

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menciptakan harmoni dalam keberagaman di negara yang bersemboyan Bhinneka Tungga Ika merupakan pekerjaan mutlak yang mesti dilakukan secara bersama-sama dan terpadu. Indonesia merupakan salah satu negara besar di dunia dengan populasi penduduk hampir dua ratus lima puluh juta jiwa yang memiliki beragam suku, budaya, ras, agama, dan antar golongan, bahkan populasi penduduk yang sangat besar menempatkan Indonesia pada posisi ke empat negara dengan jumlah penduduk tertinggi. Kondisi ini dapat dipandang sebagai bonus dalam konteks demografi, akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik maka jumlah penduduk yang hampir seperempat milyar jiwa tersebut dapat menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa.

Kemajemukan merupakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia, kemajemukan menjadi keniscayaan bagi bangsa yang membuka diri dengan bangsa lain. Jika kemajemukan didukung oleh jiwa toleransi yang tinggi dari warganya, maka *landscape* bangsa Indonesia tidak tersekat menurut kamus kepentingan masing-masing (Suryadi, 2011, hlm. 308). Sebab Indonesia adalah barat, tengah, dan timur, tidak boleh ada bagian yang tersungkur (Shihab, 2016, hlm. 13). Sayangnya, keberagaman yang toleran dalam satu dasawarsa terakhir justru terancam oleh adanya berbagai gesekan yang dapat menerbitkan air mata keresahan dari seluruh warga di pelosok tanah air bahkan dari warga yang sepi dari pemberitaan di media massa.

Beragam gesekan yang kadang berujung konflik lahir karena beberapa hal pokok yang mendasarinya. Pertama, Gerakan Radikalisme yang sudah bersarang dalam pikiran sekelompok warga telah menjadi virus untuk melawan ideologi Pancasila, sehingga kerap melahirkan peperangan antar kedua ideologi ini. Kondisi tersebut tentu mengancam pilar-pilar kebangsaan, sehingga pemerintah mengambil langkah tegas untuk membubarkan organisasi yang berbau radikalisme sebagai cara penyelamatan bangsa. Di sisi lain, ada sekelompok warga yang masih bersikap intoleran. Berdasarkan Survei Wahid Foundation menunjukkan Indonesia masih rawan perilaku intoleran dan

radikal. Dari total 1.520 responden, sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatarbelakang yang berbeda (<http://nasional.kompas.com>).

Survei Wahid Foundation bisa berlaku dalam dunia pendidikan kita, sehingga guru yang menjadi aktor kunci dituntut lebih piawai untuk memupuk karakter toleransi sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidik harus menyadari keragaman yang menjadi *landscape* kebhinekaan bangsa ibarat warna-warni kelopak bunga yang mudah terkoyak. Untuk menjaganya tetap indah dibutuhkan ketelatenan untuk merawat (Suryadi, 2017).

Kedua, fanatisme agama yang sempit menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pudarnya karakter toleransi dalam diri peserta didik. Fanatisme agama yang sempit berdampak pada pemikiran yang cenderung subjektif terhadap ajaran agama lain, terlebih lagi mereka memandang perbedaan sebagai bentuk yang harus disamakan bukan dihargai. Hal ini terlihat dari maraknya isu konflik SARA yang didasarkan atas perbedaan agama serta pandangan kelompok radikal kanan tertentu yang menganggap bahwa masyarakat yang tidak sepemahaman dengannya adalah “musuh”. Pandangan-pandangan tersebut tentunya dinilai sebagai pemikiran yang tidak realistis karena pemikiran tersebut mengabaikan nilai “pluralisme” yang ada di Indonesia. Pemahaman fanatisme agama yang sempit secara tidak langsung telah mengikis kesatuan umat, karena umat beragama seharusnya bisa menciptakan toleransi baik pada kelompok sendiri, maupun umat beragama lain, tapi dengan fanatisme yang berlebihan justru menciptakan kesenjangan. Hal ini tragedi yang menimpa warga Ahmadiyah, Syiah, dan konflik agama yang sering terjadi telah menodai harmoni kehidupan keberagamaan (Zainuri dkk, 2012, hlm 2). Kilas balik dari kekerasan yang pernah terjadi lebih kejam berlangsung dalam konflik antaretnis dan antaragama, seperti Pontianak, Sampit, Ambon, dan Poso, Tolikora. Rekam jejak konflik antaretnis dan antaragama bisa terjadi di kalangan peserta didik walaupun dalam lingkup yang lebih kecil. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan tumbuh subur oleh pendidik dalam diri mereka, karena kelak nanti bisa menjadi virus bagi negara-bangsa Indonesia.

Ketiga, munculnya ujaran kebencian (*hate speech*) bernada penistaan agama ramai di media sosial membuat para penganutnya terus-menerus menebarkan

pernyataan dan opini, baik dalam bentuk kata-kata, gambar maupun video yang berisi cacian, hujatan, hinaan kepada agama atau kelompok lain. Jika dianalisis, isinya tidak pernah jauh dari provokasi dan propaganda mengenai isu yang bersifat negatif atau dikenal dengan berita bohong (*hoax*). Hal tersebut merupakan salah satu bentuk nyata yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran, prasangka dan curiga, bahkan perkelahian di dunia nyata. Media saat ini bagaikan industri bagi individu atau kelompok tertentu untuk meraup keuntungan. Berdasarkan data yang dilansir oleh Tirto.id pada tahun 2016 bahwa industri ini menghasilkan pendapatan sekitar 25 juta rupiah perbulan selama tahun 2016. Alih-alih memproduksi berita di media massa didasarkan pada kepentingan pasar (*market oriented*), sehingga sulit terlepas dari kepentingan individu atau kelompok tertentu (Malatuny, 2017, hlm 2). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahwa sepanjang tahun 2016 terdapat 2700 *hoax* berhasil diproduksi oleh media. Tentu jumlah ini tidaklah sedikit mengingat perkembangan dalam era konvergensi media membuat luberan informasi tersebar begitu cepat dan tidak dapat dibendung oleh setiap warga negara.

Sejalan dengan pernyataan di atas, persoalan besar yang melingkupi kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi ini adalah keterpurukan moral pada sebagian besar warga bangsa. Keterpurukan moral tersebut menunjukkan kecenderungan ketidakmampuan masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Sikap yang ditampilkan atas perbedaan seringkali berkebalikan dengan karakter bangsa sebagai jati diri yang selama ini dikenal menjunjung toleransi.

Pada titik demikian, orang kemudian berpaling pada pendidikan sebagaimana digariskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas):

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Salah satu tujuan pendidikan adalah menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kompetensi sehingga mampu bersaing di dunia nyata. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi di bidang ilmu pengetahuan, keterampilan serta kompetensi sikap yang meliputi kompetensi religius dan kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap individu karena pada hakekatnya setiap manusia tidak bisa lepas dari kegiatan berinteraksi dengan sesamanya di masyarakat.

Pendidikan sebagai salah satu langkah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkan potensi peserta didik sesuai dengan apa yang terdapat dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 dan 2 yakni :

Pasal 1: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara; Pasal 2: Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan yang diselenggarakan tidak lain adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian menjadikan peserta didik lebih terampil dan memiliki kepribadian yang baik serta memiliki kecerdasan spiritual yang baik kepada Sang Pencipta-Nya. Pendidikan yang diselenggarakan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun berdasarkan data dan fakta di lapangan, kondisi pendidikan nasional dianggap belum berhasil dalam menanamkan dan membentuk karakter baik (*good character*) bagi setiap peserta didik. Di bidang pendidikan masalah yang dihadapi adalah proses pembelajaran cenderung mengajarkan pendidikan moral dan budi pekerti sebatas teks dan kurang mempersiapkan siswa untuk menyikapi dan menghadapi kehidupan yang kontradiktif.

Dalam konteks pendidikan formal di sekolah, ada indikasi bahwa salah satu penyebab dari berbagai masalah yang timbul disebabkan oleh orientasi pendidikan yang terpaku pada kecerdasan intelektual semata. Sedangkan aspek *soft skills* sebagai unsur

utama pendidikan karakter belum diperhatikan secara optimal bahkan cenderung diabaikan. Hal tersebut dikemukakan oleh Muslich (2011, hlm 170) bahwa “proses pendidikan yang berlangsung kurang memberikan makna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik. Hal tersebut berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan”. Hal senada juga ditegaskan Winaputra (2012, hlm 132) bahwa “PPKn sebagai implementasi pendidikan karakter dalam pelaksanaannya belum mengarah pada misi sebagaimana seharusnya”.

Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan salah arah tersebut antara lain adalah sebagai berikut; Pertama, proses pembelajaran dan penilaian PPKn lebih menekankan pada dampak intruksional (*Intruictional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitif saja sedangkan pengembangan dimensi lainnya (*afektif dan psikomotorik*) dan pemerolehan dampak pengiring (*nurturant effects*) sebagai “*hidden curriculum*” belum mendapat perhatian sebagai mana mestinya dan; Kedua, pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa/mahasiswa melalui perlibatannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan ekstrakurikuler), sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaning learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan prilaku siswa/mahasiswa Winaputra (2012, hlm 131-132)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran PPKn belum mencapai keseluruhan dimensi secara optimal seperti yang digagaskan, sehingga tujuan dari kurikuler PPKn belum bisa tercapai sepenuhnya. PPKn sebagai implementasi dari pendidikan karakter merupakan salah satu misi yang harus diemban. Misi lain adalah sebagai pendidikan politik atau pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan HAM.

Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, mata pelajaran PPKn dan Agama memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam pendidikan karakter. Maksudnya dalam kedua mata pelajaran tersebut pendidikan karakter harus menjadi tujuan pembelajaran. Perubahan karakter peserta didik merupakan usaha yang disengaja/direncanakan (*instructional effect*), bukan sekedar dampak pengiring (*nurturant effect*). Maka PPKn

dan Agama adalah mata pelajaran strategis dalam pelaksanaan pendidikan karakter secara pedagogis.

Dunia pendidikan formal atau persekolahan menjadi sorotan yang sangat besar, hal tersebut disebabkan oleh penguatan pendidikan karakter yang semakin mendesak untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan kita mengingat krisisnya degradasi karakter atau moralitas anak bangsa. Di sinilah letak pentingnya menanamkan nilai toleransi melalui pendidikan karakter, sehingga masyarakat Indonesia akan mampu membuka visi pada cakrawala yang semakin luas.

Oleh sebab itu sudah saatnya pendidikan mengambil alih kembali fungsinya dalam mendidik dan membentuk karakter manusia Indonesia yang berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila. Tentunya kita tidak ingin degradasi moralitas bangsa semakin akut, maka melalui pendidikan karakter yang diimplementasikan dalam institusi pendidikan diharapkan mampu mengatasi krisis degradasi karakter atau moralitas anak bangsa. Lebih dari itu, diharapkan di masa yang akan datang akan terlahirnya generasi bangsa yang memiliki karakter toleransi beragama yang tinggi. Penumbuhan karakter toleransi sejak dini menjadi sebuah jalan keluar bagi proses perbaikan dalam masyarakat. Situasi sosial yang ada menjadi alasan utama agar pendidikan karakter segera dilaksanakan secara inklusif pada pembelajaran semua mata pembelajaran di kelas dan diluar kelas.

Pemerintah pusat sudah memberikan berbagai alternatif solusi yang diantaranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. PPK merupakan upaya penguatan karakter bangsa yang diwujudkan melalui berbagai program pemerintah baik di tingkat dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Penguatan karakter pada program nasional PPK difokuskan pada lima nilai utama karakter bangsa yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. PPK ini kemudian menjadi program yang berintegrasi dengan program pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menerapkan wahana pendidikan berbasis karakter dengan nama pendidikan berkarakter yang terfokus pada berbagai nilai kebangsaan yang salah satunya adalah toleransi.

Upaya pendidikan berkarakter dalam mengembangkan nilai-nilai toleransi harus dilakukan dalam berbagai aktivitas dan lingkungan. Dalam lingkungan masyarakat hal ini menjadi sangat penting, karena banyak kepentingan yang terdapat di dalamnya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam membiasakan toleransi, di mana anak-anak belajar dan internalisasi nilai-nilai penting bagi kehidupan mereka.

Sikap toleransi dalam lingkungan sekolah merupakan nilai yang penting dan mendasar untuk dikembangkan. Sekolah disepakati sebagai bentuk sistem sosial yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen masyarakat sekolah dengan berbagai latar; ekonomi, lingkungan keluarga, kebiasaan-kebiasaan, agama bahkan keinginan, cita-cita dan minat yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini bisa menjadi penyebab benturan-benturan kepentingan yang mengarah pada konflik-konflik kepentingan. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan sekolah, pembinaan nilai toleransi dapat dilaksanakan dan ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan hal-hal lain yang bersifat afektif.

Mengingat begitu pentingnya pendidikan berkarakter dalam menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama, maka penulis merasa tertarik untuk mempertanyakan dan menelusuri sejauhmana sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menjalankan pendidikan karakter. Bagaimana peran dan upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam proses pendidikan karakter dalam menumbuhkan sikap toleransi beragama siswa di lingkungan sekolah.

Bertitik tolak dari fenomena di atas, peneliti memilih satuan pendidikan SMP Negeri 1 Purwakarta Jawa barat. SMPN 1 Purwakarta merupakan sekolah yang telah menerapkan Konsep Pendidikan Berkarakter sesuai dengan Perbup No 16 tahun 2015 tentang pendidikan Berkarakter. Selain itu sekolah ini ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai sekolah percontohan dalam mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Sebagai percontohan, sekolah tersebut menyediakan ruangan khusus untuk ibadah sesuai ajaran agama dan keyakinannya masing-masing.

Sehingga, pelajar tersebut bisa setiap hari beribadah sebelum belajar. Untuk itu, berdasarkan masalah yang telah diuraikan akan dijawab dengan studi yang dilakukan

dengan judul “**Implementasi Pendidikan Berkepribadian Dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Antar Umat Beragama Siswa**” (Studi Kasus di SMP N 1 Purwakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, secara umum rumusan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Implementasi pendidikan berkepribadian dalam menumbuhkan sikap toleransi beragama siswa?

Demi ketajaman analisis, rumusan masalah tersebut dispesifikasi menjadi sub-sub pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program pendidikan berkepribadian di SMPN 1 Purwakarta?
2. Mengapa program Pendidikan Berkepribadian menjadi penting dalam menumbuhkan sikap toleransi bagi peserta didik di SMPN 1 Purwakarta?
3. Bagaimana peran sekolah dalam menumbuhkan nilai toleransi bagi peserta didik di SMPN 1 Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan implementasi pendidikan berkepribadian dalam menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama siswa di SMPN 1 Purwakarta.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengungkapkan implementasi program pendidikan berkepribadian di SMPN 1 Purwakarta.
2. Untuk mengetahui pentingnya pendidikan berkepribadian dalam menumbuhkan sikap toleransi bagi peserta didik di SMPN 1 Purwakarta.

3. Untuk mengungkapkan peran sekolah dalam menanamkan nilai toleransi bagi peserta didik di SMPN 1 Purwakarta.

D. Manfaat Peneleitian

a. Segi Teori

1. Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang Implementasi Pendidikan Berkepribadian dalam menumbuhkan sikap Toleransi Beragama siswa di SMP N 1 Purwakarta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi program studi Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengkaji implementasi pendidikan berkepribadian dalam menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama siswa.

b. Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai konsep pendidikan guna Menciptakan harmoni dalam keberagaman atau toleransi antar umat beragama di negara yang bersemboyan Bhinneka Tungga Ika. Sehingga program pendidikan berkepribadian Pendidikan berkepribadian purwakarta di harapkan menjadi pilot project atau acuan bagi seluruh sekolah di indonesia pendidikan karakter dalam penerapannya yang tidak hanya bersifat konseptual namun lebih aplikatif.

c. Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan: Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.
2. Peneliti lanjutan, sebagai bahan informasi dan perbandingan agar dikembangkan konsep dan teori lain untuk meningkatkan peran pendidikan bagi upaya penanaman sikap toleransi

d. Segi Isu dan Aksi Sosial

1. Bagi Sekolah: Dapat mengembangkan kebijakan formal dalam bidang pendidikan, belajar dan pembelajaran untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Pendidikan berkarakter purwakarta di harapkan menjadi pilot project atau acuan bagi seluruh sekolah di indonesia pendidikan karakter dalam penerapannya yang tidak hanya bersifat konseptual namun lebih aplikatif.
2. Institusi Pemerintah: Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat mempertegas pentingnya pencegahan sikap intoleransi pada peserta didik melalui program pendidikan Berkarakter dan keteladanan yang baik dari pejabat pemerintah dalam kehidupan bernegara.

E. Struktur Organisasi Penulisan Tesis.

Tesis yang akan dikembangkan tersusun menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari (1) bab pendahuluan, (2) bab tinjauan pustaka, (3) metode penelitian, (4) hasil penelitian dan pembahasan, dan (5) simpulan dan rekomendasi. Pada bab pendahuluan secara rinci mendeskripsikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis. Pada bab selanjutnya tinjauan pustaka yang berisikan tentang Implementasi pendidikan Berkarakter yang terdiri dari pendidikan karakter (pengertian pendidikan karakter, tujuan pendidikan karakter, indikator aspek-aspek pendidikan karakter, implementasi pendidikan karakter di sekolah), nilai toleransi dalam pendidikan karakter, Di bagian akhir ditutup dengan hasil penelitian yang relevan.